

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual seperti yang tertuang pada Pancasila sebagai landasan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, pemerintah senantiasa memaksimalkan pemanfaatan sumber daya serta potensi yang dimiliki oleh Indonesia baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi ekonomi negara kita. Untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan beberapa program seperti pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh beberapa elemen baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sektor industri kecil merupakan salah satu bentuk strategi alternatif untuk mendukung perkembangan ekonomi dalam pembangunan jangka panjang di Indonesia. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah menarik perhatian yang lebih serius dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat umum. Dari perspektif dunia pun diakui bahwa usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM)

memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju.

Tabel 1.1
Kontribusi UMKM dan Usaha Besar

Ket/Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Unit Usaha (unit)					
a. UMKM	51,409,612	52,764,603	53,283,732	55,206,444	56,534,592
b. Usaha Besar	4,650	4,677	4,838	4,952	4,968
Tenaga Kerja (orang)					
a. UMKM	94,024,278	96,211,332	99,401,775	101,772,458	106,657,509
b. Usaha Besar	2,756,205	2,674,671	2,839,711	2,891,224	3,150,645
PDB (milyar rupiah)					
a. UMKM	2,613,226	2,993,151	3,466,393	4,303,571	4,869,568
b. Usaha Besar	2,080,582	2,301,709	2,602,369	3,123,514	3,372,296

Sumber: Data primer diolah (Kementerian Koperasi dan UMKM)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM jauh lebih banyak daripada usaha besar yang ada di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Terhitung dari 2008 sampai dengan 2012 peningkatannya mencapai 9%. UMKM juga berhasil menyumbang tenaga kerja dengan rata-rata 99,6 juta tiap tahunnya dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Sedangkan dalam aspek PDB pun, UMKM juga tidak kalah dengan usaha besar yaitu ia berhasil menyumbang rata-rata sebesar 3.649.181 milyar sedangkan usaha besar hanya sebesar 2.696.094 milyar.

Tambunan (2009:2) mengemukakan bahwa peranan UMKM sangat penting dibandingkan dengan usaha besar karena karakteristik-karakteristik utama mereka,

yaitu: (1) Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi usaha besar), dan usahanya tersebar di seluruh pelosok pedesaan, termasuk di wilayah-wilayah yang relatif terisolasi. Hal ini berdampak positif terhadap perekonomian pedesaan yang tidak lain dan tidak bukan juga sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM-nya; (2) UMKM termasuk dalam sektor padat karya yang berarti suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin; (3) UMKM di negara berkembang yang berlokasi di pedesaan, kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian; (4) UMKM memakai teknologi yang lebih ‘cocok’ (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang dipakai oleh perusahaan modern atau usaha besar) terhadap proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di negara berkembang yakni SDA (Sumber Daya Alam) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang melimpah; (5) Banyak UMKM bisa tumbuh dengan pesat. Bahkan, UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis besar pada tahun 1997-1998. Oleh sebab itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar;

Hadiyati (2009:183) menyatakan bahwa krisis ekonomi yang pemulihannya berjalan selama tujuh tahun menunjukkan ekonomi Indonesia tidak hanya mengandalkan peranan usaha besar, tetapi UMKM terbukti mempunyai ketahanan relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha yang skalanya lebih besar. Tidak

mengerankan bahwa UMKM pada waktu krisis memiliki peranan yang strategis dan penting ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha yang skalanya lebih besar. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan. Keempat, memiliki sumbangan kepada devisa negara dengan nilai ekspor yang cukup stabil

Pakar ekonomi Islam, Antonio Syafi'i dalam *Bincang Tuntas Bisnis Syariah* di TV One tanggal 13 Juli 2013 mengatakan bahwa:

“Penyelamat ekonomi Indonesia pada saat terjadi krisis adalah para pengusaha kecil yang terkadang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari.”

Pernyataan tersebut sesuai dengan hadist nabi yaitu “Nabi Muhammad SAW bersabda: *Sesungguhnya engkau ini dibantu, diselamatkan dan dapat rezeki dari orang-orang kecil.*”

Mengembangkan UMKM di tiap-tiap provinsi merupakan salah satu cara terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jawa timur merupakan provinsi yang perkembangan pertumbuhannya selalu meningkat lima tahun terakhir ini (Kajian Ekonomi Regional Jatim Tri-3, 2012). Sektor perdagangan, hotel dan restoran berkontribusi sebesar 30% lebih terhadap PDRB sektoral Jawa Timur pada tahun 2012. Menurut Kepala BPS Jatim, hingga akhir tahun 2012 jumlah UMKM di Jawa Timur mencapai 6.852. 931 usaha. Pengoptimalisasian peran

UMKM pada masing-masing daerah akan memberikan dampak positif pada perkembangan UMKM itu sendiri dan perkembangan perekonomian daerah tersebut. Jumlah UMKM di Jawa Timur berdasarkan survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jatim hingga akhir 2012, mencapai tak kurang dari 6,8 juta UMKM. Jumlah tersebut lebih banyak daripada UMKM berdasarkan survey hingga tahun 2006 yang juga dilakukan oleh BPS Jatim yang hanya mencapai angka 4,2 juta UMKM. Berdasarkan jumlah UMKM di masing-masing kabupaten dan kota, jumlah terbesar ada di Kabupaten Jember yakni sebanyak 424.151 usaha. Setelah Jember, jumlah terbesar kedua ada di Kabupaten Malang dan Kabupaten Banyuwangi. (<http://surabaya.tribunnews.com/2013/05/31/jumlah-umkm-di-jatim-mencapai-68-juta> diakses 18 Oktober 2013)

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Bambang Sumantri menjelaskan, jumlah UMKM di Kabupaten Malang terus berkembang. Data terakhir menunjukkan UMKM berjumlah 273.091 unit yang bergerak di berbagai sektor usaha dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 469.274 orang (www.memoarema.com/30525/273-091-umkm-serap-469-274-pekerja.html diakses 12 November 2013). Melihat begitu besarnya kontribusi UMKM pada PDB, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, di lain pihak UMKM menghadapi berbagai masalah yang belum terselesaikan yang berhubungan dengan iklim usaha.

Hasil kajian dari tim Fakultas Ekonomi USU tahun 2006 dalam Ramdhansyah & Silalahi (2013:30) menunjukkan bahwa masalah permodalan menempati urutan pertama dalam upaya peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah di Sumatera

Utara. Hasil kajian ini didukung oleh penelitian Syarif dan Budhiningsih (2009) yang mendapati masalah utama yang dihadapi UMKM adalah masalah permodalan. Kecilnya omzet yang dimiliki oleh usaha mikro mengakibatkan peningkatan modal usaha juga berjumlah kecil. Usaha mikro juga jarang yang memiliki badan hukum sehingga kurang memiliki kekuatan pada aspek kelembagaan. Dua alasan ini menjadi penghambat serius untuk mengembangkan usaha mikro. Lembaga-lembaga keuangan formal pada umumnya memperlakukan usaha kecil sama dengan usaha menengah dan usaha besar. Mereka meminta jaminan dan laporan kelayakan bisnis ketika usaha kecil mengajukan pembiayaan. Pada lembaga keuangan formal juga menetapkan nilai minimal peminjaman dana. Misalnya, seorang peminjam baru bisa mengakses pembiayaan di Bank X ketika ia meminjam dana sebesar Rp 5.000.000,00 keatas. Namun kenyataannya, para pengusaha kecil untuk melanjutkan usahanya sehari-hari hanya membutuhkan dana kurang dari nilai minimal yang telah ditetapkan Bank tersebut. Pengurusan aplikasi kredit yang memakan waktu juga dihindari oleh pihak usaha kecil karena meninggalkan usaha untuk pengajuan aplikasi berarti harus meninggalkan peluang untuk mendapatkan pembeli.

Dengan model pembiayaan seperti diatas kurang cocok dengan kondisi pengusaha kecil sehingga solusi yang mereka ambil adalah dengan cara kredit dari rentenir karena kendala-kendala pengajuan kredit relatif tidak ditemui dan berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan formal. Namun, bunga yang diterapkan oleh para rentenir sangat tinggi dan memberatkan pihak peminjam dana. Sehingga, tidak jarang hal tersebut malah membuat usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha kecil

mengalami kesulitan. Seringkali pelaku UMKM dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis (tidak *bankable*) oleh perbankan, mereka beralih pada BMT yang telah memperbesar akses pembiayaan bagi mereka dan memberikan fleksibilitas persyaratan dan pembayaran yang lebih baik dibandingkan dengan bank komersial. Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah (Soemitra, 2009:64). Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncullah usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR syariah dan BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan pembiayaan pelaku UMKM.

BMT merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil yang berkualitas dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan perekonomiannya berdasarkan prinsip syariah dan koperasi (Rodoni & Hamid, 2008:62). BMT jika berkembang akan menjadi koperasi yang berlandaskan syariah. Seperti yang dikutip dalam buku karya Rodoni dan Hamid (2008:69), BMT memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, yaitu: (1) Adanya jaminan pelayanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dan bebas praktik riba; (2) Menggunakan prinsip bagi hasil; (3) Masing-masing pihak antara BMT dan nasabah dapat berbagi risiko karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan proporsinya; (4) Terhindarnya praktik-praktik manipulasi dan monopoli keuangan; (5) Adanya

pemerataan dan keseimbangan dalam perolehan keuntungan; (6) Adanya rasa kekeluargaan antara BMT dengan nasabah. Hubungan nasabah tidak hanya sebagai peminjam dana atau kredit namun sebagai satu keluarga besar yang saling peduli dan membantu.

KANINDO Syariah Jawa Timur memiliki anggota yang tersebar di wilayah Malang Raya. Untuk menunjang pelayanan anggota dan calon anggota agar lebih optimal KANINDO Syariah Jawa Timur telah membuka 12 Kantor Cabang/Layanan yang tersebar di Kabupaten Malang 10 kantor, Kota Malang 1 kantor dan Kota Batu 1 kantor. KANINDO menyediakan pembiayaan untuk para usaha kecil di sekitar wilayah masing-masing kantor layanan. Dengan begitu, KANINDO bisa mendekati pada nasabah sehingga nasabah tidak perlu datang lagi ke kantor untuk melakukan cicilan pembayaran. Penelitian ini dilakukan pada nasabah yang tergabung pada KANINDO Syariah Jawa Timur Cabang Dau karena kantor pusat dari KANINDO terletak disini dan dilihat dari jumlah UMKM yang banyak memberikan kontribusi salah satunya adalah mengurangi pengangguran. Kurang lebih sebanyak 14.558 tenaga kerja terserap oleh aktivitas UMKM di kecamatan Dau ini.

Setelah dilakukan analisis data ditemukan bahwa model pembiayaan yang ada di KANINDO selama ini adalah pembiayaan individu dimana para nasabah datang pada *Account Officer* dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Namun tidak sedikit nasabah yang tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke kantor dan melakukan panggilan pada salah satu pegawai di KANINDO untuk melakukan pembiayaan. Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk nasabah lama. Sedangkan,

untuk nasabah baru kurang mendapatkan perlakuan yang sama. Sehingga, dengan memunculkan dan mendeskripsikan model pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan membantu dalam setiap aspek usaha mereka. Sehingga judul penelitian yang penulis lakukan adalah “MODEL ALTERNATIF PEMBIAYAAN *MICROFINANCE* SYARIAH BERDASARKAN PERSEPSI UMKM (Studi Kasus Pada Nasabah Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana model pembiayaan yang selama ini diterapkan oleh KANINDO Syariah Jawa Timur Cabang Dau untuk nasabahnya yang merupakan pelaku UMKM?
2. Bagaimana alternatif model pembiayaan *microfinance* syariah berdasarkan persepsi UMKM yang menjadi nasabah KANINDO Syariah Jawa Timur Cabang Dau?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan model pembiayaan yang selama ini diterapkan oleh KANINDO Syariah Jawa Timur Cabang Dau untuk para nasabahnya yang merupakan pelaku UMKM.
2. Untuk menemukan alternatif model pembiayaan *microfinance* berdasarkan persepsi para pelaku UMKM yang menjadi nasabah Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk berpikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi serta pengaplikasian dari ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bagi lembaga kampus, hasil ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan sebagai bahan masukan bagi fakultas untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum yang diberikan mampu memenuhi tuntutan perkembangan dunia perekonomian dewasa ini.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak *microfinance* dalam menerapkan model pendanaan yang unggul, professional dan juga sesuai yang diinginkan oleh para pelaku usaha kecil.

4. Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang serupa pada bidang kajian yang sama.

